



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1116/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019 Jakarta, 10 Agustus 2019  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Tindak Lanjut Putusan  
Mahkamah Konstitusi

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Agustus 2019 berkenaan dengan beberapa perkara PPHU DPR-DPRD (daftar terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota segera menetapkan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada;
  - a. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - b. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menjadwalkan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan atau Putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU. Batas waktu 5 (lima) hari dihitung sejak Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diunggah di JDIH KPU.
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencantumkan Nomor Perkara Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 9 Agustus 2019 dalam perkara PPHU DPR-DPRD pada bagian "konsideran memperhatikan" Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota (daftar terlampir).

3. KPU Provinsi/KIP Aceh segera menyampaikan Berita Acara dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik beserta lampirannya serta Berita Acara, dan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh kepada KPU.
4. KPU/KIP Kabupaten/Kota segera menyampaikan Berita Acara dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik beserta lampirannya serta Berita Acara, dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU.
5. KPU Provinsi/KIP Aceh segera mengusulkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur guna keperluan pengucapan sumpah janji Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh.
6. KPU/KIP Kabupaten/Kota segera mengusulkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota guna keperluan pengucapan sumpah janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Republik Indonesia



Arief Budiman

Tembusan Yth:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi, di Jakarta
2. Ketua Bawaslu, di Jakarta.

REKAP AMAR PUTUSAN PHPU PILEG 2019

9 AGUSTUS 2019 – 07.30

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Amar Putusan
1.	02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Langkat 2; Kota Tebingtinggi 3	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya</p>
2.	131-09-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo)	Humbang Hasundutan 2	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya</p>
3.	33-13-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) - Janji Mangasal Ranto Butar Butar (Caleg Partai Hanura)	Tapanuli Selatan 5; Asahan 1; Labuhan Batu 5; Tapanuli Tengah 2	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Asahan 1 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Asahan, Dapil Labuhan Batu 5 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Labuhan Batu, dan Permohonan Pemohon Perseorangan atas nama Janji Mangasal Ranto Butar Butar untuk Dapil Tapanuli Selatan 5 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Ditarik;</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Amar Putusan
					Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Tapanuli Tengah 2 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Tidak Dapat Diterima.
4.	197-05-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem)	Mandailing Natal 4; Kota Pematang Siantar 1	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya</p>
5.	145-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) - Ir. Albert P. Silitonga (Caleg Partai Gerindra)	SUMUT II; Sumut 9; Kota Binjai 3	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil SUMUT II;</p> <p>Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;</p> <p>Membatalkan Keputusan KPU 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut 9;</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Amar Putusan
					<p>Memerintahkan kepada KPU Kab. Humbang Hasundutan untuk melakukan penghitungan suara ulang di tingkat Kecamatan Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan untuk perolehan suara anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan cara membuka C1 Plano di semua TPS di Kecamatan Dolok Sanggul, dan memperbaiki Form Model C1, DAA, DA dan DB, dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;</p> <p>Memerintahkan kepada KPU RI untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud amar angka 4;</p> <p>Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU RI untuk melakukan pengawasan terhadap penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud amar angka 4;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>
6.	87-03-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	Dairi 3; Samosir 1; Simalungun 5; Kota Padang Sidempuan 3	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Amar Putusan
7.	246-06-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)	Nias Selatan 5	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Mengabulkan Eksepsi Termohon, sepanjang mengenai Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>
8.	117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Samosir 1	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.</p>
9.	173-04-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Partai Golkar) - R. Boysandy Martua Pane (Caleg Partai Golkar)	SUMUT II; Tapanuli Selatan 2; Deli Serdang 6; Langkat 1; Tapanuli Tengah 3; Kota Medan 4	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Tapanuli Selatan 2 untuk DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;</p> <p>Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Deli Serdang 6 untuk DPRD Kab. Deli Serdang, Dapil Tapanuli Tengah 3 untuk DPRD Kab. Tapanuli Tengah, dan Dapil Langkat 1 untuk DPRD Kab. Langkat, Tidak Dapat Diterima;</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Amar Putusan
					Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
10.	205-07-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Partai Berkarya)	Kota Gunung Sitoli 1	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.</p>
11.	04-02/PHPU-DPD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag	SUMATERA UTARA	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.</p>
12.	09-02/PHPU-DPD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis	SUMATERA UTARA	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, sepanjang mengenai Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>
13.	23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) - Mahmuddin Nasution (Caleg PKB)	Sumut 8; Tapanuli Selatan 3; Humbang Hasundutan 1; Nias Selatan 1	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Amar Putusan
					<p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima, sepanjang Dapil Sumut 8 untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Dapil Tapanuli Selatan 3 untuk DPRD Kab. Tapanuli Selatan;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>
14.	52-14-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Demokrat	Deli Serdang 1; Deli Serdang 6; Padang Lawas Utara 1	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Mengabulkan Eksepsi Termohon; Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>
15.	143-20-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2019	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)	Sumut 8; Simalungun 6	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Simalungun 6 untuk DPRD Kab. Simalungun, Tidak Dapat Diterima;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Amar Putusan
16.	216-07-24/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Partai Berkarya)	?	<b>(Ketetapan)</b> Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.
17.	91-19-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Kota Pangkalpinang 3	<b>Dalam Eksepsi:</b> Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;  Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur;  <b>Dalam Pokok Permohonan:</b> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
18.	148-02-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)	KEP. BABEL	<b>Dalam Eksepsi:</b> Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;  Menyatakan Permohonan Pemohon, Tidak Jelas atau Kabur;  <b>Dalam Pokok Permohonan:</b> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
19.	231-07-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Partai Berkarya)	?	<b>(Ketetapan)</b> Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Amar Putusan
20.	65-14-07/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	Partai Demokrat	KEP. BABEL; Bangka Selatan 4	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.</p>

**REKAP AMAR PUTUSAN PHPU PILEG 2019**  
**9 AGUSTUS 2019 – 14.15**

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
1.	104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Sumbar 2	<b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
2.	125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN) - Mardison Basir (Caleg PAN)	Agam 4; Pesisir Selatan 2	<b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon;  <b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon untuk Dapil Pesisir Selatan 2, Perseorangan Calon Anggota DPRD Kab. Pesisir Selatan atas nama Drs. H. Mardison Basir, Tidak Dapat Diterima;  Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
3.	102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) - Junaidi Samsudin (Caleg PPP)	JABAR III; Bogor 2; Bekasi 3; Kota Sukabumi 3; Kota Bekasi 2	<b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon;  <b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Bogor 2 untuk keanggotaan DPRD Kab. Bogor;  Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Bekasi 3 untuk keanggotaan DPRD Kab. Bekasi, Tidak

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
					Dapat Diterima;  Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
4.	202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Jabar 1	<b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
5.	123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN) - Jeni Jayusman, S.Sos. (Caleg PAN) - James Martin (Caleg PAN)	JABAR VIII; JABAR XI; Jabar 15; Kota Cimahi 2	<b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon;  <b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil JABAR XI untuk keanggotaan DPR RI, Gugur;  Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Jabar 15 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat dan Dapil Kota Cimahi 2 untuk DPRD Kota Cimahi, Tidak Dapat Diterima;  Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
6.	47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019	Partai Demokrat	JABAR I; Jabar 9; Kuningan 1; Indramayu 3; Kota Depok 2	<b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil JABAR I untuk keanggotaan DPR RI dan Dapil Kota Depok 2 untuk keanggotaan DPRD Kota Depok, Ditarik Kembali;

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
					<p>Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Indramayu 3 untuk keanggotaan DPRD Kab. Indramayu dan Dapil Kota Kuningan 1 untuk DPRD Kab. Kuningan, Tidak Dapat Diterima;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Jabar 9 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>
7.	199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem) - Muhammad Aaron Annar S. (Caleg Partai NasDem)	JABAR IX; Bekasi 2; Bogor 4; Majalengka 5	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon 1, sepanjang Dapil Bekasi 2 untuk keanggotaan DPRD Kab. Bekasi;</p> <p>Menyatakan Permohonan Pemohon 2, sepanjang Dapil JABAR IX untuk keanggotaan DPR RI, Gugur</p> <p>Menyatakan Permohonan Pemohon 1, sepanjang Dapil Majalengka 5 untuk keanggotaan DPRD Kab. Majalengka, Tidak Dapat Diterima;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon 1, sepanjang Dapil JABAR IX untuk keanggotaan DPR RI dan Dapil Bogor</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
					<p>4 untuk keanggotaan DPRD Kab. Bogor;</p> <p>Membatalkan Keputusan KPU 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara anggota DPRD Kab. Bekasi Dapil Bekasi 2;</p> <p>Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan penyandingan data dari Form C1 dengan Form Model C1 Plano untuk TPS_TPS Desa Telaga Murni, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, yang belum dilakukan penyandingan data, sesuai kesepakatan pada tanggal 23 April 2019 dalam waktu 14 hari kerja setelah pengucapan putusan ini;</p> <p>Memerintahkan kepada KPU RI untuk membuat rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan dengan menggabungkan hasil penyandingan data di 75 TPS, ditambah dengan TPS-TPS yang sebelumnya belum dilakukan penyandingan data C1 dengan Form Model C1 Plano di Desa Telaga Murni, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, yang kemudian dibuat rekapitulasi secara keseluruhan untuk perolehan suara anggota</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
					DPRD Kab. Bekasi Dapil Bekasi 2;  Memerintahkan kepada KPU RI untuk menetapkan hasil rekapitulasi sebagaimana amar angka 7 si atas, tanpa melaporkan kepada Mahkamah.
8.	01-08-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun 2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Kubu Raya 2	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon;  <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
9.	04-08-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Hulu Sungai Tengah 2	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon;  <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
10.	03-18/PHPU-DPD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019	Prof. Dr. Farouk Muhammad	NTB	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon, Pihak Terkait 1 dan Pihak Terkait 2;  <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
11.	13-01-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Bombana 1; Buton Tengah 3; Wakatobi 1	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon;  <u>Dalam Pokok Permohonan:</u>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
					<p>Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Bombana 1 untuk keanggotaan DPRD Kab. Bombana dan Dapil Wakatobi 1 untuk keanggotaan DPRD Kab. Wakatobi, Tidak Dapat Diterima;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon, sepanjang berkenaan dengan Dapil Buton Tengah 3 untuk keanggotaan DPRD Kab. Buton Tengah.</p>
12.	180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Partai Golkar) - Kanna, S.H., M.H. (Caleg Partai Golkar)	Sultra 5; Kolaka Utara 1	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Sultra 5 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Tidak Dapat Diterima;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Kolaka Utara 1 untuk keanggotaan DPRD Kab. Kolaka Utara.</p>
13.	86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	Donggala 2; Sigi 5	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menolak Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Donggala 2 untuk keanggotaan DPRD Kab. Donggala;</p> <p>Mengabulkan Permohonan Pemohon, sepanjang</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
					<p>Dapil Sigi 5 untuk keanggotaan DPRD Kab. Sigi, untuk sebagian;</p> <p>Membatalkan Keputusan KPU 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kab Sigi Dapil Sigi 5;</p> <p>Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, pada TPS 01 Desa Bolobia, Kec. Kinofaro, Kab. Sigi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan putusan aquo;</p> <p>Memerintahkan kepada KPU RI untuk menetapkan perolehan suara sebagaimana amar angka 4 di atas, tanpa melaporkan kepada Mahkamah.</p>
14.	44-13-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun 2019	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) - Ir. Mule (Caleg Partai Hanura)	Bantaeng 3; Enrekang 3	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
					Bantaeng 3 untuk keanggotaan DPRD Kab. Bantaeng, Tidak Dapat Diterima;  Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
15.	18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	MALUT; Malut 4	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon;  <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
16.	201-05-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem)	Malut 5; Kep. Sula 2; Kep. Sula 4; Halmahera Utara 2	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon;  <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Malut 5 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara, Tidak Dapat Diterima;  Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**REKAP AMAR PUTUSAN PHPU PILEG 2019**

**9 AGUSTUS 2019 – 19.40**

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
1.	83-03-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	PAPUA; Papua 5; Lanny Jaya 1; Mamberamo Tengah 3; Puncak 3; Tolikara 2; Kota Jayapura 3; Kota Jayapura 4	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Kota Jayapura 3 untuk keanggotaan DPRD Kota Jayapura, Tidak Dapat Diterima;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>
2.	96-19-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Bulan Bintang (PBB)	Papua 3; Jayawijaya 2; Tolikara 2	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.</p>
3.	207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Beringin Karya (Partai Berkarya)	Kota Jayapura 1; Kota Jayapura 3	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Kota Jayapura 3 untuk keanggotaan DPRD Kota Jayapura, Tidak Dapat Diterima;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
					selebihnya.
4.	11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Papua 4; Kep. Yapen 1; Lanny Jaya 1; Lanny Jaya 2; Mappi 1; Puncak 1; Puncak 3	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Papua 4 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Dapil Puncak 1 dan Dapil Puncak 3 untuk keanggotaan DPRD Kab. Puncak, dan Dapil Lanny Jaya 1 untuk keanggotaan DPRD Kab. Lanny Jaya, Tidak Dapat Diterima;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>
5.	144-20-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia)	PAPUA; Papua 4; Kota Jayapura 3; Kota Jayapura 4	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Papua 4 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Dapil Kota Jayapura 3 dan Dapil Kota Jayapura 4 untuk keanggotaan DPRD Kota Jayapura, Tidak Dapat Diterima;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
6.	161-02-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)	PAPUA; Papua 2; Papua 7; Jayawijaya 1; Lanny Jaya 2; Lanny Jaya 3	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil PAPUA untuk keanggotaan DPR RI atas nama Caleg Yan Peternas, Dapil Papua 2 dan Dapil Papua 7 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Dapil Jayawijaya 1 untuk keanggotaan DPRD Kab. Jayawijaya, Dapil Lanny Jaya 2 dan Dapil Lanny Jaya 3 untuk keanggotaan DPRD Kab. Lanny Jaya, Tidak Dapat Diterima;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>
7.	170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Golongan Karya (Golkar) - Abas Katinur (Partai Golkar)	PAPUA; Papua 6; Dogiyai 1; Kep. Yapen 2; Lanny Jaya 1; Lanny Jaya 2; Lanny Jaya 3; Sarmi 1; Sarmi 2; Sarmi 3; Kota Jayapura 1; Kota Jayapura 2	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>
8.	42-13-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Hati Nurani (Hanura)	Papua 1; Papua 3; Papua 4; Keerom 1; Kota Jayapura 1; Kota Jayapura 3	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
					<p>Papua 1 atas nama Caleg Moh. Fajar Takari, Yulianus Kwa dan Jembi Kombo, dan Dapil Papua 3 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Dapil Keerom 1 untuk keanggotaan DPRD Kab.Keerom, dan Dapil Kota Jayapura 1 dan Dapil Kota Jayapura 3 untuk keanggotaan DPRD Kota Jayapura, Tidak Dapat Diterima;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>
9.	20-01-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	PAPUA; Kota Jayapura 2	<p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil PAPUA untuk keanggotaan DPR RI, Tidak Dapat Diterima;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>
10.	243-06-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)	Jayawijaya 2; Jayawijaya 4; Lanny Jaya 3; Nabire 2; Asmat 1; Mimika 1; Yahukimo 2	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk sebagian;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.</p>
11.	203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Papua 1; Papua 3; Keerom 1; Kep. Yapen 1; Kep. Yapen 2; Kep.	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
				Yapen 4; Mamberamo Tengah 1; Puncak 1; Puncak 3; Tolikara 1; Tolikara 2; Tolikara 3; Tolikara 4	<p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Papua 1 dan Dapil Papua 3 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Dapil Keerom 1 untuk keanggotaan DPRD Kab.Keerom, dan Dapil Tolikara 1, Dapil Tolikara 2, Dapil Tolikara 3 dan Dapil Tolikara 4 untuk keanggotaan DPRD Kab. Tolikara, Tidak Dapat Diterima;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>
12.	111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Papua 1; Papua 2, Papua 4	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Papua 2 dan Dapil Papua 4 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Tidak Dapat Diterima;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>
13.	116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN) - Abdul Ganing, S.E. (Caleg PAN)	Papua 2; Papua 3; Papua 6; Asmat 1; Asmat 2; Jayawijaya 2; Jayawijaya 4; Paniai 1; Paniai 2; Puncak Jaya 4; Sarmi 2	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b></p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
					<p>Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Asmat 1 untuk keanggotaan DPRD Kab. Asmat dan Dapil Sarmi 2 untuk keanggotaan DPRD Kab. Sarmi, Tidak Dapat Diterima;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>
14.	68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Demokrat	PAPUA; Papua 4; Papua 6; Keerom 3; Kep. Yapen 2; Kep. Yapen 3; Mamberamo Tengah 3; Sarmi 2; Sarmi 3; Yalimo 3; Lanny Jaya 1; Mimika 1; Nabire 4; Puncak Jaya 1; Puncak Jaya 3; Waropen 2	<p><u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;</p> <p><u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil PAPUA untuk keanggotaan DPR RI, Dapil Papua 6 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua, Dapil Keerom 1 untuk keanggotaan DPRD Kab. Keerom; Dapil Waropen 2 untuk keanggotaan DPRD Kab. Waropen, Dapil Puncak Jaya 3 untuk keanggotaan DPRD Kab. Puncak Jaya, Dapil Mimika 1 Perseorangan atas nama Lexy David Linturan untuk keanggotaan DPRD Kab. Mimika, Dapil Lanny Jaya 1 untuk keanggotaan DPRD Kab. Lanny Jaya, Dapil Sarmi 2 dan Dapil Sarmi 3 untuk keanggotaan DPRD Kab. Sarmi, serta Dapil Nabire 4 untuk keanggotaan DPRD Kab. Nabire, Tidak Dapat Diterima;;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
15.	137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo)	Deiyai 1; Kep. Yapen 2; Kep. Yapen 4	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Kep. Yapen 2 dan Dapil Kep. Yapen 4 untuk keanggotaan DPRD Kab. Kep. Yapen, Tidak Dapat Diterima;;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>
16.	194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem)	Papua 2; Jayapura 1; Jayapura 2; Jayapura 3; Nabire 1	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Menolak Eksepsi Termohon Pihak Terkait;</p> <p><b><u>Dalam Pokok Permohonan:</u></b> Menyatakan Permohonan Pemohon, sepanjang Dapil Kep. Jayapura 1, Dapil Jayapura 2, dan Dapil Jayapura 3 untuk keanggotaan DPRD Kab. Jayapura, Tidak Dapat Diterima;;</p> <p>Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</p>
17.	07-33/PHPU-DPD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Papua Tahun 2019	Carel Simon Petrus Suebu	PAPUA	<p><b><u>Dalam Eksepsi:</u></b> Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk sebagian, sepanjang mengenai Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur;</p>

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Dapil	Putusan
					<u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.
18.	08-33/PHPU-DPD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Papua Tahun 2019	Hasbi Suaib, S.T., M.H.	PAPUA	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon;  <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
19.	10-33/PHPU-DPD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Papua Tahun 2019	Drs. Paulus Yohanes Sumino, M.M., OFS	PAPUA	<u>Dalam Eksepsi:</u> Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;  <u>Dalam Pokok Permohonan:</u> Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.

Kesekretariatan KPU di Mahkamah Konstitusi  
Gdg. Kementerian Koordinator Perekonomian RI Lt. 4